

## BPBD dan KPU Masih Sinkronisasi Data TPS Rawan Banjir di Jakarta

**JAKARTA (IM)** - Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), masih menyinkronkan data Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan banjir. "Hingga saat ini kami masih dikoordinasikan dengan KPU untuk titik koordinat seluruh TPS," ujar Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI, Michael Sitanggang saat dikonfirmasi, Jumat (15/12).

Menurut Michael, sinkronisasi data ini dilakukan untuk memastikan kondisi terkini lingkungan TPS yang disebut rawan banjir.

Dengan begitu, BPBD DKI Jakarta dapat menyusun strategi mitigasi dan penanggulangan banjir yang sesuai dengan kebutuhan di kawasan tersebut. "Jadi untuk mitigasi strategisnya akan dibuat setelah adanya sinkronisasi ini," kata Michael.

Sebelumnya, KPU DKI Jakarta melaporkan 2.841 TPS di Ibu Kota rawan banjir pada saat Pemilu serentak 2024. Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya menjelaskan, ri-

buan titik rawan banjir itu diketahui berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan terhadap 30.766 TPS di seluruh Ibu Kota. "Dari total 30.766 TPS, telah dipetakan sebanyak 2.841 TPS yang masuk ke dalam lokasi rawan banjir," ujar Dody dalam keterangan tertulis, Selasa (5/12).

Jakarta Timur dan Jakarta Utara menjadi wilayah dengan jumlah TPS rawan banjir terbanyak pada Pemilu 2024.

Secara terperinci, terdapat 978 TPS di 24 kelurahan di Jakarta Timur yang rawan terendam. Sementara di Jakarta Utara, terdapat 653 TPS rawan banjir yang tersebar di tujuh kelurahan.

"Untuk data sebaran rincinya lokasinya, masih proses verifikasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Masih di sinkronisasi dengan data dari BPBD," ujar Dody, Kamis (7/12) lalu.

Adapun untuk wilayah Jakarta Selatan, terdapat 545 TPS di 15 kelurahan yang rawan banjir. Sedangkan di Jakarta Selatan, ada 344 TPS di 29 kelurahan yang juga rawan. "Untuk Jakarta Pusat, ada 313 TPS di 13 kelurahan yang rawan," kata Dody. ● yan

## BPBD DKI Dirikan 2 Tenda Pengungsi untuk Korban Kebakaran Manggarai

**JAKARTA (IM)** - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mendirikan dua tenda pengungsian korban kebakaran di jalan Manggarai Utara 2, Jakarta Selatan. Warga sekitar mengatakan sejumlah barang masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bertahan selama di tenda pengungsian.

Muhammad Zen (60), warga Manggarai mengeluhkan masih kurangnya kebutuhan dasar seperti popok untuk anak, sepatu, dan pakaian.

"Yang dibutuhkan masyarakat selama ini paling popok, peralatan sekolah seperti sepatu, kan hilang terbakar celana, baju seragam," tutur Zen, Jumat (15/12) di depan tenda pengungsian.

Ia mengatakan bahwa kejadian kebakaran terjadi pukul 11.00 WIB saat dirinya sedang tidur.

Ia mendengar telah terjadi kebakaran hebat di sekitar rumahnya. Sontak ketika mengetahui kejadi-

an kebakaran tersebut ia langsung menyelamatkan surat-surat berharga yang ia miliki.

"Saya lagi tidur, dan enggak tahu, kemudian saya dibangunin sama keponakan. Saya bangun dan kaget. Saat itu, saya lihat ke depan dan ke belakang tidak ada, ternyata pas saya lihat di atas sudah gede apinya. Lalu saya lari bawa anak-anak dan surat-surat," terang Zen.

Sebagaimana diketahui, pihak Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Selatan menerima informasi kebakaran yang bersumber dari pangkalan bambu, Jalan Manggarai 2 RT 010 RW 001 Kelurahan Manggarai.

Pihak Gulkarmat Jakarta Selatan mengerahkan total 30 unit dan 115 petugas gulkarmat ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Sekitar pukul 14.35 WIB, kebakaran dinyatakan telah padam, diperkirakan luas area yang terbakar mencapai 1.500 meter. ● yan

## Dorong Masyarakat Melek Metrologi, Depok Bentuk Kecamatan Tertib Ukur

**DEPOK (IM)** - Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal Kota Depok memiliki inovasi baru dengan berencana akan membentuk Kecamatan Tertib Ukur.

Inovasi ini merupakan upaya mendorong Masyarakat Melek Metrologi (3M), khususnya Camat, Lurah, dan stakeholder wilayah.

Program ini baru dimulai di Kecamatan Sawangan, awal Desember 2023.

"Sawangan menjadi kecamatan yang pertama, nanti kami akan sosialisasi ke wilayah lainnya sampai 11 kecamatan," ujar Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Depok, Ahmad Zaki Mubarak, Jumat (15/12).

Menurut Zaki, Tim UPTD Metrologi Legal memberikan pemahaman tentang Kemetrolgian, pengenalan tera-tera ulang alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), serta kewajiban tera bagi pelaku usaha dan Posyandu yang menggunakan alat ukur dalam kegiatan sehari-hari.

"Tera-tera ulang alat UTTP harus dilakukan oleh masyarakat yang kesehariannya menggunakan neraca. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan

kepada konsumen, karena produk yang dibeli akurat dan sesuai dengan nilai transaksi," jelasnya.

UPTD Metrologi Legal Kota Depok juga memiliki peranan yang penting dalam melindungi kepentingan umum, baik produsen dan konsumen melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran. Salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui sosialisasi kemetrolgian.

"Selama ini kami sudah menjalankan amanat melakukan pengecekan UTTP pedagang pasar tradisional dan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di SPBU dan gas elpiji," terang Zaki. Lanjut Zaki, pihaknya juga berkewajiban untuk membantu pemerintah pengecekan ketepatan pada timbangan dan alat ukur tinggi badan anak di posyandu.

Langkah tersebut dilakukan karena alat ukur berat dan tinggi badan merupakan tolak ukur adanya stunting pada anak.

"Anak dikatakan stunting itu berdasarkan berat badan dan tinggi badannya, kami ingin timbangan itu akurat saat dipakai tidak ada mis," ungkapnya. ● yan

# 4 | Metropolis

FOTO: ANT



## PAMERAN SENI "WORK IN PROGRESS"

Pengunjung memotret karya seni pada pameran bertajuk "Work In Progress" di Galeri Nasional, Jakarta, Jumat (15/12). Pameran oleh komunitas Sketsa Pulang Kerja itu bercerita mengenai rangkaian proses unik dan personal yang dijalani setiap seniman dalam menciptakan sebuah karya yang berlangsung hingga 23 Desember 2023.

## Jokowi: MRT Bundaran HI-Ancol Diharapkan Beroperasi 2027

Jokowi berharap pembangunan fase berikutnya akan diteruskan, termasuk rencana pembangunan MRT dari kawasan timur menuju barat Jakarta. Hal ini demi mengintegrasikan sistem transportasi massal di Jakarta.

**JAKARTA (IM)** - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut proyek MRT Fase 2 dari Bundaran HI-Ancol diharapkan beroperasi pada

2027. Saat ini proses pembangunan MRT Fase 2A dari Bundaran HI hingga ke kawasan Kota telah mencapai 28,4%.

"Jadi untuk Fase 2A dari Bundaran HI menuju ke kota dari target perencanaan 27%, sekarang sudah mencapai 28,4%, sudah melebihi target. Saya kira bagus, dan kita harapkan berfungsi nanti 2027," kata Jokowi sesuai meninjau proyek pembangunan MRT Fase 2A di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (15/12).

Jokowi menyebut pembangunan terowongan MRT di kawasan 2A sudah selesai, sehingga pekerjaan akan

diteruskan ke Fase 2B dari Kota menuju Ancol.

"Ini pekerjaan yang tidak mudah karena harus bekerja di dalam keramaian Jakarta. Pekerjaan di bawah waktu membuat tunnel terowongannya juga bukan sesuatu yang gampang. Namun, ini progresnya sudah di atas target," jelasnya.

Jokowi juga berharap pembangunan fase berikutnya akan diteruskan, termasuk rencana pembangunan

MRT dari kawasan timur menuju barat Jakarta. Hal ini demi mengintegrasikan sistem transportasi massal di Jakarta.

"Semuanya masih dalam proses dan segera diputuskan. Ketika hitung-hitungan, kalkulasi studinya sudah rampung semua, langsung kita putuskan. Memang Jakarta membutuhkan transportasi massal yang terintegrasi, bukan sendiri-sendiri," kata Jokowi. ● yan

## BPN Kota Depok Dorong Hunian Vertikal Sebagai Pemecah Problem Tata Ruang



Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan hadir menjadi pemateri Peringatan Hari Tata Ruang 2023 dan Peringatan Hari Bhakti ke-78 PU Kota Depok, di Alun-alun GDC Kota Depok, Kamis, (14/12). (Foto: BPN Kota Depok)

**DEPOK (IM)** - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok mendorong hunian vertikal sebagai pemecah problem tata ruang. Solusi ini, meredam imbas derasnya urbanisasi yang melahirkan konflik ketersediaan lahan bagi masyarakat perkotaan.

Pengelasan ini disampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Indra Gunawan, saat menjadi pembicara pada Peringatan Hari Tata Ruang 2023 dan Peringatan Hari Bhakti ke-78 PU Kota Depok, yang berlangsung di Alun-alun GDC Kota Depok, Kamis, (14/12).

"Jika niat dan semangatnya untuk mewujudkan tata ruang Kota Depok yang maju berbudaya dan sejahtera, maka sejak sekarang harus dicarikan solusi. Minimal kinerja dan kolaborasi bukan sebatas tagline saja," tegas Indra Gunawan.

Dipaparkan Indra, Kota Depok dengan luas kurang lebih 200,2 km persegi, diprediksi akan mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan dalam 10 tahun mendatang.

"Sekarang saja, kita sudah

merasa beberapa jalan di kota kita terasa sempit. Untuk itu, perencanaan yang baik sangat penting untuk masa depan warga Kota Depok," ujarnya.

Indra Gunawan menekankan pentingnya perencanaan dalam pengaturan ruang untuk masa depan. Terlebih, harga properti di Kota Depok dibandingkan dengan Jakarta tidak berbanding lurus. Padahal, jika melihat rentang kendali atau jarak sangat berdekatan.

"Coba kalau beli rumah di Jakarta dengan Rp 2 miliar, luasnya mungkin hanya 50 meter persegi. Tapi di Depok, dengan harga yang sama, luasnya bisa mencapai 100-200 meter persegi," jelasnya.

Indra menambahkan bahwa pemerintah berusaha mengatur ukuran rumah agar tidak terlalu kecil.

"Kita menghitung, misalnya untuk keluarga baru dengan 3 orang, mereka akan membutuhkan ruang. Jadi, kita menyediakan berapa meter persegi agar orang-orang yang tinggal di Depok merasa nyaman," ulasnya.

Menurut simulasi yang telah dilakukan sejumlah

"Melengkapi kepemilikan lahan bukan hanya sebatas memiliki sertifikat tapi ada kewajiban lain di dalamnya yaitu menggunakan, memanfaatkan, menguasai secara fisik," tuturnya.

Maka tak jarang timbul masalah. Konflik pertanahan dampak dari minimnya pemanfaatan lahan, dibiarkan, tidak diurus bahkan sengaja tidak diurus dalam hal penguasaan fisik.

"Dari kalkulasi yang ada, mungkin sekitar 650.000 bidang pertanahan yang berkonflik di Indonesia. Sementara di Kota Depok tidak lebih dari 200 bidang yang bermasalah dan sudah diselesaikan lewat jalur hukum maupun perdamaian," ungkapnya.

Dalam konteks ini, BPN Kota Depok mengharapkan masyarakat khususnya pengusaha mampu mengantisipasi gejala masalah yang akan muncul. Sejalan dengan itu, Pemkot Depok dituntut bisa berkolaborasi dengan stakeholder terkait dalam menerapkan RTRW yang menjadi landasan.

"Kolaborasi yang dilakukan diharapkan mampu mel-

hentikan ide kreatif dan inovatif dalam mengatasi tantangan ke depan. Matangkan selalu RTRW dalam meredam arus urban," tegasnya.

Di penghujung dialog publik tersebut, Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan mendapatkan penghargaan dalam Peringatan Hari Tata Ruang 2023 dan Peringatan Hari Bhakti ke-78 PU Kota Depok.

Menariknya, untuk memberikan semangat audiens yang hadir, Indra Gunawan memberikan bonus Gopay bagi masyarakat yang berhasil menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan. Sementara, warga Kota Depok yang mendapatkan yakni Sumarsilah, Eti Septiani, Elfa Apidiani dan Windy.

"Sekali lagi saya sampaikan, begitu kompleksnya persoalan yang ada, penataan ruang harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Libatkan peran publik, khususnya dalam pemanfaatan lahan. BPN Kota Depok siap berkolaborasi, karena ini bagian dari tanggung jawab kami," pungkaskan Indra Gunawan. ● ber

## DPRD Minta BUMD DKI Jamin Stok Pangan Aman Jelang Nataru

**JAKARTA (IM)** - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) menjamin ketersediaan stok pangan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifi mengatakan, Pemprov DKI harus memastikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang pangan, untuk memperhatikan ketersediaan barangnya.

"Saya minta Pemprov mengkoordinir seluruh

BUMD pangan untuk memastikan ketersediaan," ujar Taufik dalam keterangannya, Jumat (15/12).

Menurut Taufik, salah satu yang harus diperhatikan ketersediaannya adalah daging. Sebab, permintaannya daging acap kali meningkat pada momentum Natal. Tingginya permintaan daging ini juga diprediksi bakal terjadi hingga awal 2024, karena mendekati Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Terutama daging, karena akhir tahun dan awal tahun depan ini momentum istimewa. Semua momentum itu akan berkaitan dengan permintaan yang tinggi," kata Taufik.

Di samping itu, Taufik juga mendorong BUMD menjaga stabilitas harga pangan di pasaran pada periode Natal dan Tahun Baru 2024. "Jadi jangan hanya stok saja yang dijaga, tapi juga harganya harus stabil atau terjangkau bagi masyarakat," pungkaskan. ● yan

### PENGUMUMAN

Direksi PT KARYA YASA MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2023, telah disetujui pengurangan modal dasar Perseroan dari semula Rp7.460.000.000 menjadi Rp5.000.000.000 serta modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp7.460.000.000 menjadi Rp5.000.000.000 dengan cara menarik kembali saham para pemegang saham yang telah dikeluarkan.

Pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah).

Jakarta, 16 Desember 2023

Direksi

PT Karya Yasa Mandiri

Gd. Menara Sentraya Lt. 35 JI. Iskandarsyah Raya No. 1A, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia

### PENGUMUMAN

Direksi PT KARYA YAKIN MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2023, telah disetujui pengurangan modal dasar Perseroan dari semula Rp385.000.000 menjadi Rp50.000.000 serta modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp385.000.000 menjadi Rp50.000.000 dengan cara menarik kembali saham para pemegang saham yang telah dikeluarkan.

Pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah).

Jakarta, 16 Desember 2023

Direksi

PT Karya Yakin Mandiri

Gd. Menara Sentraya Lt. 35 JI. Iskandarsyah Raya No. 1A, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia